SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN STRATEGIS PNPM MANDIRI KE DEPAN

DEPUTI SESWAPRES BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN SELAKU SEKRETARIS EKSEKUTIF TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)

2 NOVEMBER 2011

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Maret 2009 – Maret 2010 : 14,7 juta penduduk keluar dari kemiskinan; 13.2 juta penduduk masuk kembali ke bawah garis kemiskinan → Net 1,5 juta penduduk keluar dari kemiskinan

I. MENYEMPURNAKAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

- Bantuan Sosial Berbasis Keluarga
- Bantuan Kesehatan bagi Keluarga Miskin
- Bantuan Pendidikan bagi Masyarakat Miskin

II. MENINGKATKAN AKSES RUMAH TANGGA MISKIN TERHADAP PELAYANAN DASAR: PENDIDIKAN, KESEHATAN, PELAYANAN DASAR SEPERTI SANITASI DAN AIR BERSIH

III. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- Menyempurnakan pelaksanaan PNPM Mandiri

IV. PERTUMBUHAN EKONOMI BERKUALITAS: "INCLUSIVE GROWTH"

- UMKM (KUR dan Bantuan kepada Usaha Mikro)
- Industri Manufaktur Padat Pekerja
- Konektivitas Ekonomi (Infrastruktur)
- Iklim Usaha (Pasar Kerja yang Luwes dan Infrastruktur)
- Pembangunan Perdesaan
- Pembangunan Pertanian

INSTRUMEN UTAMA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Individu atau Rumah Tangga (Klaster I)
2. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas (Klaster II)
3. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil (Klaster III)

PRIORITAS JANGKA PENDEK - MENENGAH

1. Unifikasi Sistem Penargetan Nasional
2. Menyempurnakan Pelaksanaan Bantuan Sosial Kesehatan untuk Keluarga Miskin
3. Menyempurnakan Pelaksanaan dan Memperluas Cakupan Program Keluarga Harapan
4. Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lainnya ke dalam PNPM
5. Menyusun Peta Jalan *Financial Inclusion*

DASAR HUKUM TKPK DAERAH

- Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota

KELEMBAGAAN TKPK PROVINSI

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

- Ketua TKPK Provinsi: **Wakil Gubernur** yang ditetapkan oleh Gubernur.
- Sekretaris TKPK Provinsi: **Kepala Bappeda Provinsi** yang ditetapkan oleh Gubernur.
- Keanggotaan TKPK Provinsi terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan TKPK Provinsi diatur dengan Surat Keputusan Gubernur dengan memperhatikan Perpres 15/2010.

STRUKTUR ORGANISASI TKPK PROVINSI

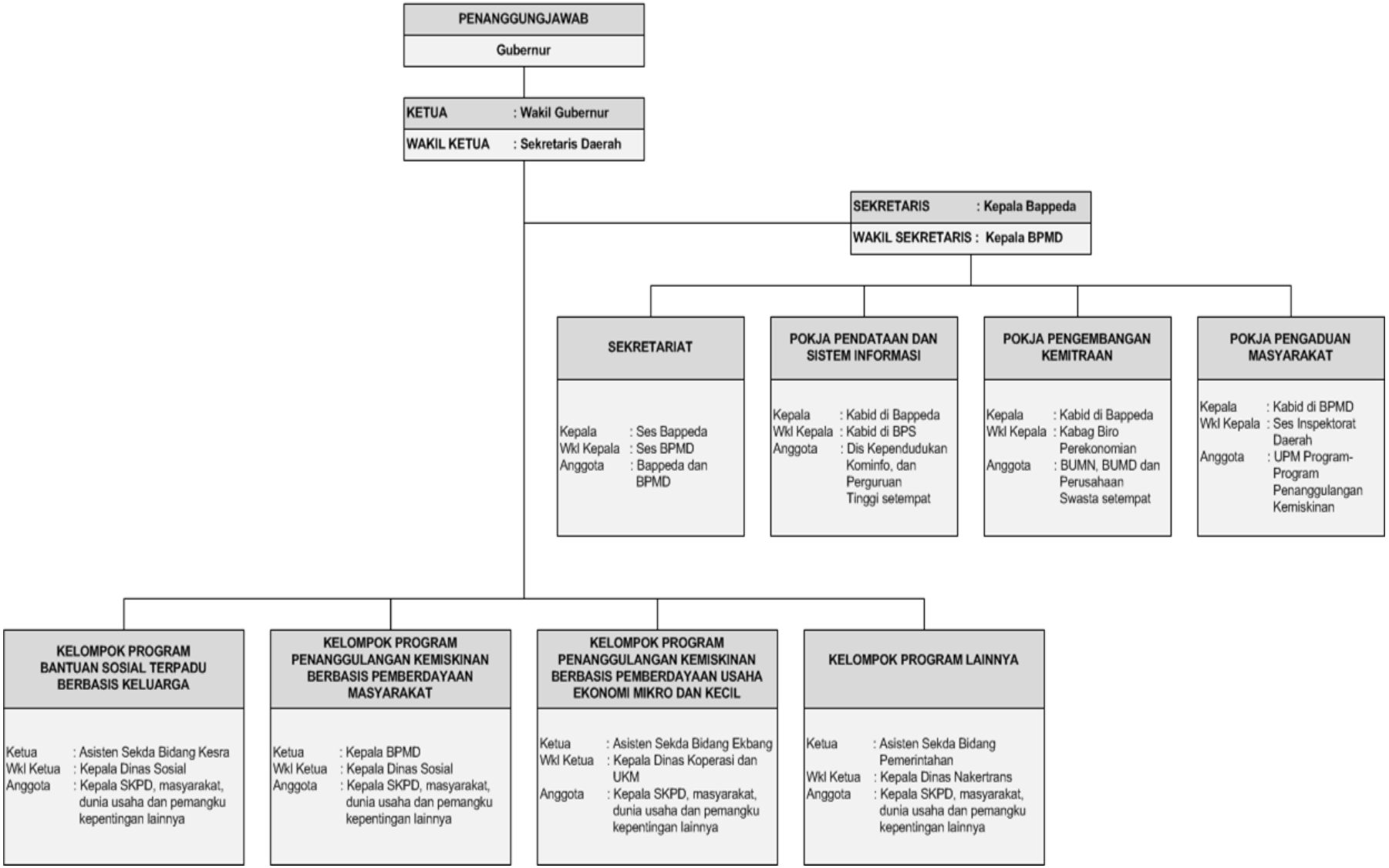

KELEMBAGAAN TKPK KABUPATEN/KOTA

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

- **Ketua** : Wakil Bupati/Wakil Walikota (ditetapkan oleh Bupati/Walikota)
- **Sekretaris :** Kepala Bappeda Kabupaten/Kota (ditetapkan oleh Bupati/Walikota)
- **Anggota** : terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan TKPK Kabupaten/Kota diatur dengan SK Bupati/Walikota dengan memperhatikan Perpres No. 15 tahun 2010.

STRUKTUR ORGANISASI TKPK KABUPATEN/KOTA

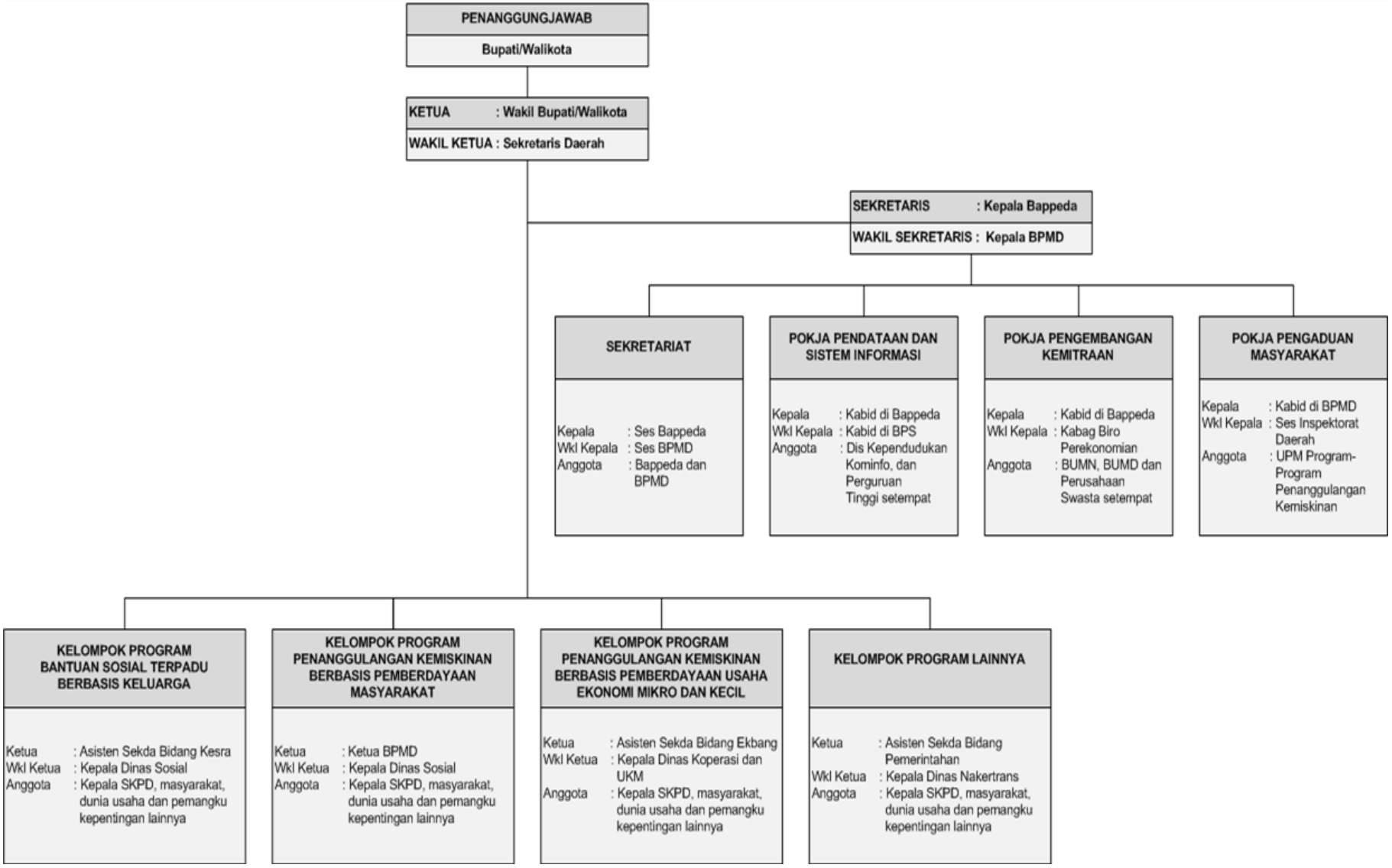

HARAPAN KEPADA TKPK DAERAH

1. TKPKD mampu mendorong **proses perencanaan dan penganggaran** yang dapat mendukung efektivitas penanggulangan kemiskinan.

2. TKPKD mampu melakukan **koordinasi dan pemantauan** program penanggulangan kemiskinan di daerah.

3. TKPKD menyampaikan laporan **hasil rapat koordinasi** TKPKD, paling sedikit 3 kali setahun (Pasal 25 Permendagri No. 42 tahun 2010); dan **hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan** di daerah kepada Wakil Presiden selaku Ketua TNP2K (Pasal 27 Permendagri No. 42 tahun 2010)

TUGAS TIM TEKNIS TKPK DAERAH

Menyiapkan Agenda Rapat TKPK Daerah, yakni:

1. Hasil analisis terhadap **kondisi kemiskinan** di daerah
2. Hasil analisis terhadap **anggaran belanja** untuk penanggulangan kemiskinan di daerah (APBN dan APBD)
3. Skema **koordinasi** dan **pengendalian** pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

No	Program	Sasaran
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
2	Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)	Rumah Tangga Hampir Miskin, Miskin dan Sangat Miskin
3	Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)	Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
4	Program Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga Miskin	Siswa dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	a. Sekolah Dasar (SD/MI)	Siswa SD dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	b. Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	Siswa SMP/MTs dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	c. Sekolah menengah Atas (SMA/MA/SMK)	Siswa SMA/MA/SMK dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
	d. Pendidikan Tinggi (Diploma dan Sarjana)	Mahasiswa dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin

No	Program	Sasaran
5	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri	Kelompok Masyarakat Umum
	a. PNPM Mandiri Perdesaan	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	a. PNPM Mandiri Perkotaan	Kelompok MasyarakatPerkotaan
	a. PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus	Kelompok Masyarakat Pedalaman, Tertinggal dan Khusus (Bencana, Konflik dll)
	a. PNPM Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	a. PNPM Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW)	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	a. PNPM Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP)	Kelompok Masyarakat Pertanian Perdesaan
	a. PNPM Kelautan dan Perikanan (KP)	Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pelaut
	a. PNPM Pariwisata	Kelompok Masyarakat Perdesaan Potensial
	a. PNPM Generasi	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	a. PNPM Green *Kecamatan Development Program* (G-KDP)	Kelompok Masyarakat Perdesaan
	a. PNPM Neigbourhood Development (ND)	Kelompok Masyarakat Perkotaan
6	Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

PERBANDINGAN PENCAPAIAN PROSES VERIFIKASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) MENURUT PROVINSI, TAHUN 2010

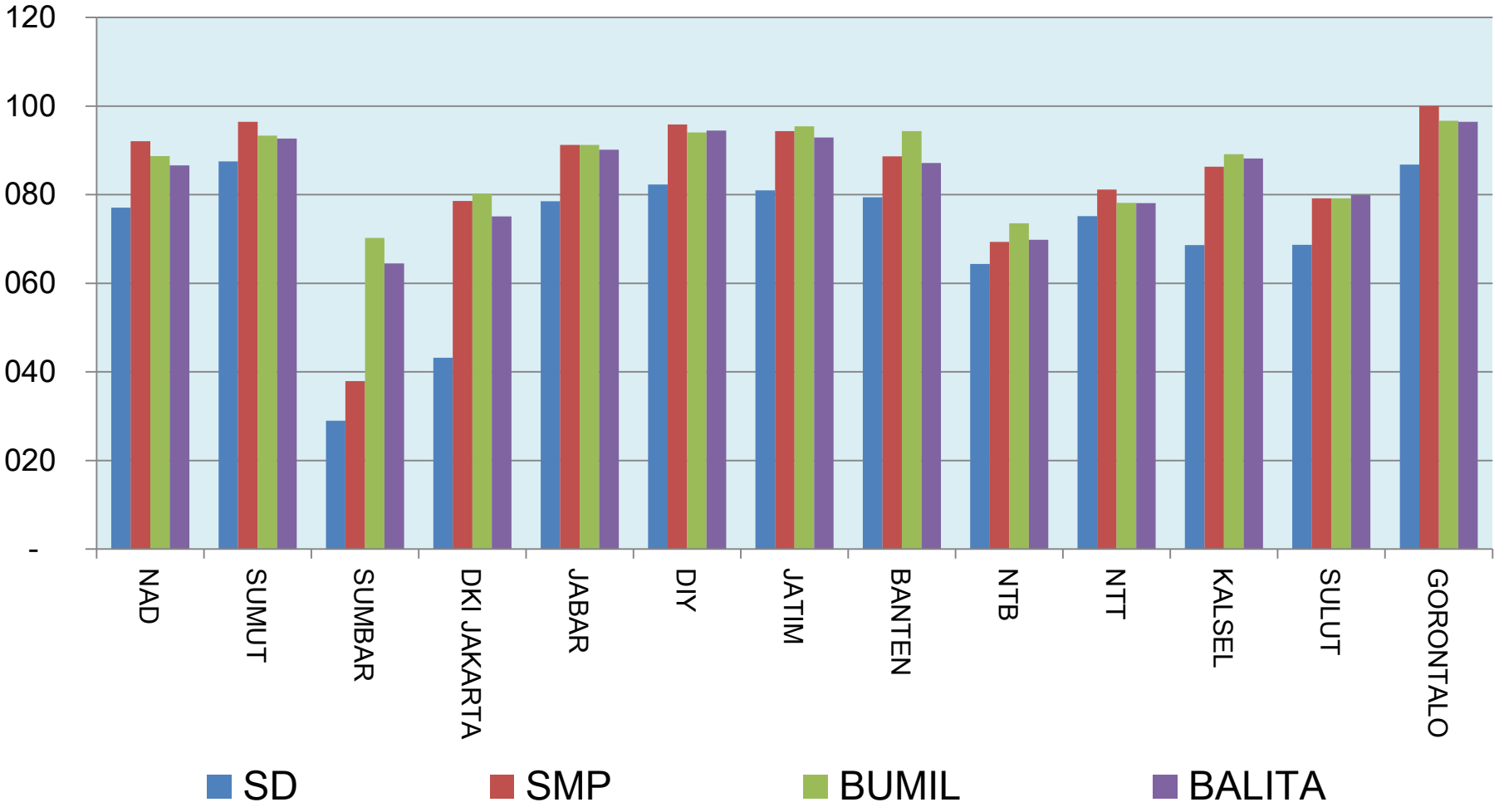

PERSENTASE ANAK BERUMUR 10-17 TAHUN MENURUT JENIS KEGIATAN, 2009

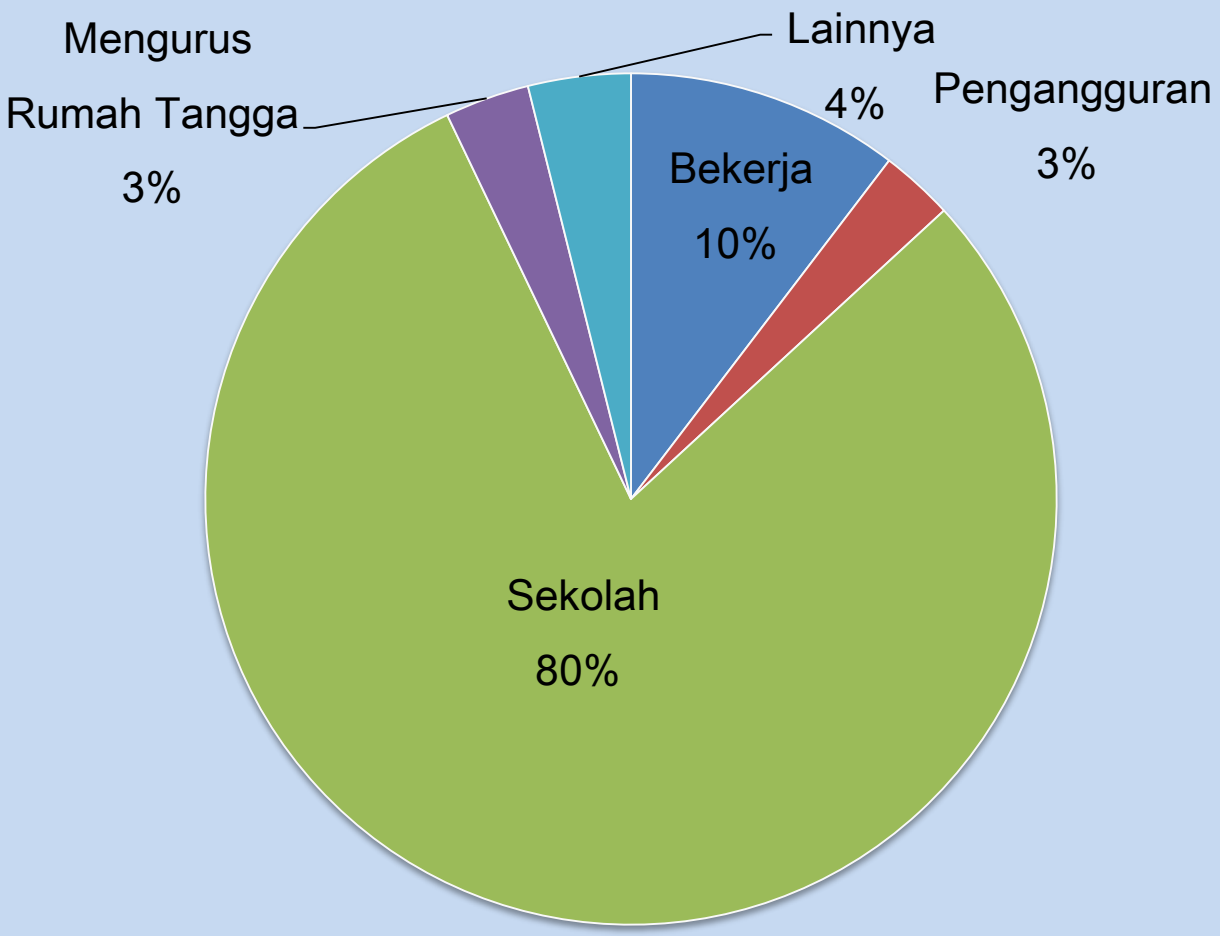

JUMLAH KREDIT PER-DEBITUR MENURUT PROVINSI (DESEMBER 2010)

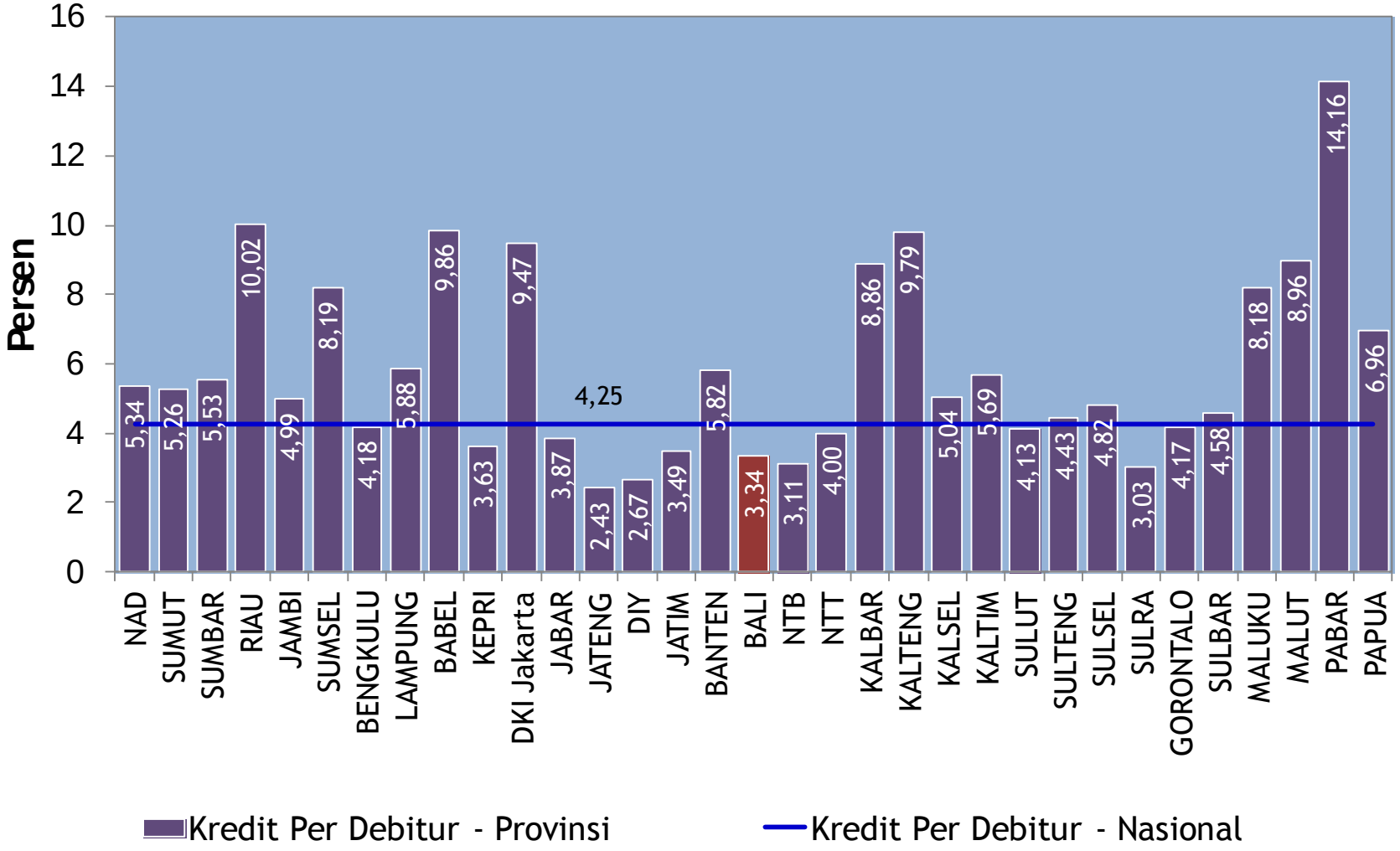

RENCANA STRATEGIS PNPM?

I. Apa Yang Dimaksud Dengan Integrasi PNPM?

- ➔ Pada Tingkat **Pemerintah Pusat**
- ➔ Pada Tingkat **Komunitas**

II. EXIT STRATEGY

- ➔ Exit Strategy **Bukan Berarti Terminasi**

INTEGRASI PADA **TINGKAT PEMERINTAH PUSAT (1)**

- Banyak program pemberdayaan masyarakat di berbagai Kementerian/Lembaga.
- Prinsip keseragaman dalam pemberdayaan?
- Koordinasi pada lokasi yang ditentukan?
- Kementerian/lembaga mana yang seharusnya melaksanakan pemberdayaan?

INTEGRASI PADA **TINGKAT PEMERINTAH PUSAT (2)**

- Apakah lebih baik jika satu kementerian/lembaga atau masing-masing kementerian/lembaga melaksanakan “pemberdayaan”?
- Apa peran dari kementerian/lembaga teknis lainnya?
- Apakah lebih baik jika kementerian/lembaga teknis hanya menyediakan daftar list program yang dapat diakses oleh komunitas?

INTEGRASI PADA TINGKAT **KOMUNITAS (1)**

- Bagaimana mengembangkan satu institusi partisipasi masyarakat yang berfungsi sebagai *program clearing house*.
- Bagaimana menghasilkan perencanaan partisipatif yang lebih baik.
- Bagaimana mengembangkan suatu mekanisme untuk memastikan bahwa perencanaan partisipatif berbasis komunitas dapat menyatu dengan perencanaan reguler.

➔ Tanpa mengorbankan proses partisipatif.

INTEGRASI PADA TINGKAT **KOMUNITAS (2)**

- Bagaimana mengembangkan suatu mekanisme yang memungkinkan hasil perencanaan partisipatif berbasis komunitas dapat diadopsi kedalam perencanaan reguler.
- Integrasi aktivitas ekonomi PNPM kedalam sistem keuangan formal.
- Apa yang harus dilakukan terhadap aset keuangan yang dimiliki oleh komunitas PNPM?

EXIT STRATEGY

- Apa yang dimaksud dengan “Exit”?
- PNPM vs. Pengembangan Komunitas?
- Apa peran dari Kementerian/Lembaga Teknis?
- Apa peran dari pemerintah daerah?
- Infrastruktur dan manajemen aset setelah-PNPM.

Terima Kasih